

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LEMBAGA
YUDISIAL : STUDI KASUS IMPLEMENTASI
KETERBUKAANNYA DALAM PEMBAHARUAN
MAHKAMAH AGUNG 2010-2014**

TUGAS AKHIR



ERRIS ACHMAD RIZKY

NIM. 1111004029

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BAKRIE

2016

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LEMBAGA
YUDISIAL : STUDI KASUS IMPLEMENTASI
KETERBUKAANNYA DALAM PEMBAHARUAN
MAHKAMAH AGUNG 2010-2014**

TUGAS AKHIR

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ilmu Politik**



ERRIS ACHMAD RIZKY

NIM. 1111004029

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BAKRIE**

2016

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Erris Achmad Rizky

NIM : 1111004029

Tanda Tangan :

Tanggal : 23 Februari 2016

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Erris Achmad Rizky

NIM : 1111004029

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul Skripsi : KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LEMBAGA
YUDISIAL: STUDI KASUS IMPLEMENTASI
KETERBUKAANNYA DALAM PEMBAHARUAN
MAHKAMAH AGUNG 2010-2014

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bani Pamungkas, SH., MSi., MPA ()

Penguji 1 : Prof. Rusadi Kantaprawira ()

Penguji 2 : Astrid Meilasari Sugiana, S.S., M.Sc., Ph.D ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Februari 2016

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tugas Akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bani Pamungkas, SH., MSi., MPA., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- 2) Prof. Rusadi Kantaprawira, selaku dosen pembahas seminar proposal skripsi yang telah member banyak masukan kepada penulis;
- 3) Astrid Meilasari Sugiana, S.S., M.Sc., Ph.D, selaku dosen penguji sidang Tugas Akhir atas masukan dan sarannya demi menyempurnakan skripsi ini;
- 4) Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Politik yang telah banyak membantu Penulis dalam proses pembelajaran selama di perkuliahan;
- 5) Para nara sumber atas kesediaan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan banyak data untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 6) Orang Tua tercinta, Ayahanda Djudjuk Abdul Rozzaq yang menjadi motivasi, penyemangat penulis setiap harinya dari masa perkuliahan sampai segera bisa mendapat gelar sarjana dan Ibunda Siti Sariroh, atas kasih sayang, ketulusan, perhatian dukungan moril dan materil, serta doa dan nasihat yang tak pernah putus untuk penulis;
- 7) Keluarga besar penulis (Adik, Nenek, Paman dan Tante) tercinta yang selalu mendukung penulis untuk mendapatkan gelar ini.
- 8) Sahabat dan teman seperjuangan penulis (Dicky Anggara, Rangga Dewoso, Henry Yahya, Dhimas Avian) dari zaman Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) di Al-Azhar Dua Pejaten, sampai satu kuliah di Universitas Bakrie Jakarta meskipun berbeda jurusan tetapi selalu memberikan

semangat, keceriaan, doa dan dukungan kepada penulis tiada henti khususnya disaat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

- 9) Sahabat-sahabat penulis lainnya yaitu Cacu, Fikri Saktiadji, Ilham, Adityo, Caesar, Jovi, Tsakif, Hizrian dan Ajis yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 10) Sahabat-sahabat Ilmu Politik tercinta dan tersayang sekaligus teman seperjuangan, yang selalu bersedia menjadi penghibur dan penyemangat di saat putus asa yaitu Taufik, Dama, Aya, Dani, Tonie, Galih dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga kesuksesan dan keberkahan selalu menyertai kita semua;
- 11) Keluarga Besar SMA Al-Azhar Dua Pejaten dan teman-teman Ilmu Politik angkatan 2011 yang selalu memberikan keceriaan, canda, tawa dan semangat dalam menjalani hari-hari setelah jam kuliah;
- 12) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tugas Akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 25 Februari 2016

Erris Achmad Rizky

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erris Achmad Rizky
NIM : 1111004029
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LEMBAGA YUDISIAL: STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERBUKAANNYA DALAM PEMBAHARUAN MAHKAMAH AGUNG 2010-2014

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Februari 2015

Yang menyatakan

(Erris Achmad. Rizky)

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LEMBAGA YUDISIAL:
STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERBUKAANNYA DALAM
PEMBAHARUAN MAHKAMAH AGUNG 2010-2014**

Erris Achmad Rizky¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pembaharuan Mahkamah Agung 2010-2014, serta menganalisa sejauh mana implementasi keterbukaan informasi tersebut telah dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Mahkamah Agung sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, masih terjadi permasalahan dalam unit struktur organisasi terkait keterbukaan informasi publik dan ada upaya untuk menutupi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun Mahkamah Agung telah melaksanakan inisiatif awal untuk membuat aturan dengan diterbitkannya SK KMA 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di pengadilan dan diperbarui dengan adanya SK KMA 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, tetapi dalam pelaksanaannya masih menunjukkan ada hambatan dalam keterbukaan informasi. Permasalahan tersebut terlihat dari ditemukannya penyalahgunaan wewenang terkait pemberian informasi dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Mahkamah Agung adalah lembaga yang mempunyai inisiatif awal dalam keterbukaan informasi publik sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut sudah dilaksanakan, tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menghambat jalannya keterbukaan informasi publik di lembaga Mahkamah Agung RI.

Kata kunci : Mahkamah Agung, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, *Good Governance*, Struktur Organisasi

¹Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bakrie

**OPENESS OF PUBLIC INFORMATION IN JUDICIARY : A CASE STUDY
IMPLEMENTATION OF OPENESS 2010 – 2014 RENEWAL OF THE
SUPREME COURT**

by Erris Achmad Rizky²

ABSTRACT

This research aims to look at the implementation of the public information openness in the renewal of the Supreme Court's 2010-2014, and analyze the extent to which implementation of the openness has been implemented. This study used a qualitative approach to the types of descriptive research. The results of this study explained that the implementation of the public information openness in the Supreme Court was implemented but not yet at the maximum. Note This is still happening in the research problems in the unit organization structure related information openness of public and there have been attempts to cover the information needed by the public. Although the Supreme Court has been carrying out an early initiative to create rules with SK KMA 144 in 2007 about information openness in court and re new with the KMA SK 1-144 in 2011 about the guidelines of the Ministry of information in the courts but in the execution shows there are still barriers in information openness. These problems visible from found abuse related information and granting authority misused for personal gain. The Supreme Court is an institution which has the initiative early in the openness of public information as one of the efforts to bring about good governance has been conducted, but at the implementation there are still obstacles hindering his net public information openness in the Supreme Court.

Keyword : *Supreme Court, Implementation of Public Information Openness, Good Governance, Structur of Organization.*

²Student of Political Science, Bakrie University.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
UNGKAPAN TERIMAKASIH	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Batasan Masalah	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN LITERATUR	
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.1.1 Sistem Politik	13
2.1.2 Informasi Publik	22
2.1.3 Keterbukaan Informasi Publik	25
2.2 Tugas dan Fungsi Lembaga Peradilan	28
2.2.1 Reformasi Birokrasi di Lembaga Peradilan	30
2.3 Kebijakan Publik	36
2.4 Penelitian Terdahulu	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	41
3.2 Jenis Penelitian	42
3.3 Metode dan Teknik Pengambilan Data	43

3.4 Lokasi Penelitian	45
3.5 Teknik Analisa Data	46
BAB IV ANALISA DATA	
4.1 Peran Mahkamah Agung Sebagai Suprastruktur Dalam Sistem Politik Indonesia	48
4.1.1 Dinamika Kelembagaan Mahkamah Agung	55
4.1.2 Reformasi dan Pembaharuan Mahkamah Agung	66
4.1.3 Penerapan Kebebasan Informasi Publik	71
4.2 Keterbukaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Mahkamah Agung	77
4.2.1 Gagasan Awal Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Mahkamah Agung	77
4.2.1.1 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Mahkamah Agung Republik Indonesia	83
4.2.1.2 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Mahkamah Agung Republik Indonesia	94
4.2.2 Performa Pelayanan Informasi Publik di Mahkamah Agung	99
4.2.2.1 Kelembagaan dan Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Mahkamah Agung	99
4.2.3 Tahapan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	107
4.2.3.1 Kategori Informasi yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat	110
4.2.3.2 Hambatan Keterbukaan Informasi Publik di Mahkamah Agung	115
4.3 Pencapaian Mahkamah Agung Dalam Pelayanan Informasi Publik	119
4.3.1 Jumlah Publikasi Putusan Mahkamah Agung dari Tahun 2007- 2014	119
4.3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik	120
4.3.2.1 Permohonan Informasi Publik Melalui Meja Informasi di Tahun 2009	120

4.3.2.2 Permohonan Informasi Publik Melalui Meja Informasi di Tahun 2010	121
4.3.3 Jumlah Sengketa Informasi Publik	125
4.4 Gagasan Pengembangan Pelayanan Informasi Publik Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI)	126
4.4.1 <i>International Framework for Court Excellence (IFCE)</i> : Gagasan Dalam Membangun Pelayanan Prima di Lingkungan Peradilan	126
4.4.2 Upaya Mengimplementasi IFCE di Lingkungan Mahkamah Agung	130
4.4.3 Usulan Pengembangan Pelayanan Informasi MA Dalam Kerangka IFCE	133
BAB V SIMPULANDAN SARAN	
5.1 Simpulan	135
5.2 Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pengumpulan Data	45
Tabel 4.1	Kinerja MARI Pada Penyelesaian Perkara (1966-1974)	57
Tabel 4.2	Penyelesaian Perkara Perdata MARI, Tahun 1995 – 1999	62
Tabel 4.3	Penyelesaian Perkara MARI dalam Era Reformasi, 1 Januari Tahun 1999 – 2000	63
Tabel 4.4	Penyelesaian Perkara di Tingkat Kasasi	66
Tabel 4.5	Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Lokakarya SK KMA No. 144 Tahun 2007	86
Tabel 4.6	Lokasi Sosialisasi SK KMA No. 144 Tahun 2007 Bagi Sekretaris/Panitera di Empat Lingkungan Peradilan	87
Tabel 4.7	Perkembangan Jumlah Data <i>Upload</i> di Mahkamah Agung	90
Tabel 4.8	Permohonan Laporan Informasi Publik (Juli - Desember 2009)	123
Tabel 4.9	Permohonan Jenis Permintaan Informasi (Tahun 2009)	123
Tabel 4.10	Jumlah Pengunjung Meja Informasi MARI (Tahun 2010)	124
Tabel 4.11	Rincian Lengkap Pengunjung Informasi (Tahun 2010)	125
Tabel 4.12	Jumlah Putusan dalam Database Putusan Mahkamah Agung.	125
Tabel 4.13	Jumlah Pengunjung Meja Informasi di Mahkamah Agung (2009 – Desember 2012)	126
Tabel 4.14	Jumlah Pengunjung Meja Informasi Mahkamah Agung RI ..	126
Tabel 4.15	Jumlah Pengunjung Meja Informasi Mahkamah Agung RI (2011 – 2013)	127
Tabel 4.16	Daftar Sengketa Dengan Termohon Mahkamah Agung RI ...	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Input – Sistem atau Proses Politik – Output	20
Gambar 2.2	Tahapan-tahapan Kebijakan Publik	38
Gambar 3.1	Alur Kerangka Berpikir	43
Gambar 3.2	Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif	47
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Tim Pembaharuan Peradilan	70
Gambar 4.2	Kegiatan Loka Karya SK KMA No.144 Tahun 2007	85
Gambar 4.3	Publikasi dan Poster Terkait Sosialisasi SK KMA 144/2007	87
Gambar 4.4	Tampilan <i>Website</i> Mahkamah Agung	88
Gambar 4.5	<i>Screenshot</i> Tampilan Direktori Putusan Mahkamah Agung	89
Gambar 4.6	Bagan Pelaksana Pelayanan Keterbukaan Informasi di Mahkamah Agung	91
Gambar 4.7	Bagan Pelaksana Pelayanan Keterbukaan Informasi di Pengadilan	92
Gambar 4.8	Layanan Meja Informasi di Mahkamah Agung	98
Gambar 4.9	Proses Alur Perkara Pada Mahkamah Agung	100
Gambar 4.10	Formulir Pengajuan Permohonan Informasi Prosedur Biasa	105
Gambar 4.11	Formulir Pengisian Register Permohonan Informasi	105
Gambar 4.12	Bagan Pelaksanaan Permohonan Biaya	106
Gambar 4.13	Formulir Permohonan Informasi dengan Prosedur Khusus	107
Gambar 4.14	Register Permohonan	107
Gambar 4.15	Bagan Pelaksanaan Permohonan Khusus	108
Gambar 4.16	Tanda Terima Pembayaran Penggandaan Perkara	108
Gambar 4.17	Tahapan Pengajuan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat	109
Gambar 4.18	Tahapan Upaya Hukum Terhadap Sengketa Informasi	111

Gambar 4.19	Jumlah Publikasi Putusan Mahkamah Agung Tahun 2007- 2011	122
Gambar 4.20	<i>Framework for Court Excellence I</i>	130
Gambar 4.21	<i>Framework for Court Excellence II</i>	130
Gambar 4.22	<i>Framework for Court Excellence III</i>	131

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara dengan Bapak DRS. Darwis, M. ENG, Kabag Pengembangan Sistem Informatika & Humas MARI(Tim Penyusun SK KMA No. 144 Tahun 2007).....	146
Lampiran 2	Transkrip Wawancara dengan Bapak Dessy Eko Prayitno, Peneliti Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) ...	152
Lampiran 3	Transkrip Wawancara dengan Bapak Choky Ramadhan S.H., LL.M., Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI)	159
Lampiran 4	Transkrip Wawancara dengan Bapak Ahmad Idris SH, MH.,Advokat (Perhimpunan Advokat Indonesia/PERADI).	168
Lampiran 5	Transkrip Wawancara dengan Bapak Bejo Untung, Peneliti Pusat telaah dan informasi Regional (PATTIRO)	172
Lampiran 6	Transkrip Wawancara dengan Bapak DRS. Bambang Hardi Winata, MM., Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Informasi Pusat	174